

**ANALISIS KINERJA BELANJA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PADA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019-2021**

**Panca Safira Amelia<sup>1</sup>, Daniswara Nursyabani<sup>2</sup>, Risma Wira Bharata<sup>3</sup>**  
**Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang**  
[panca.safira03@gmail.com](mailto:panca.safira03@gmail.com)<sup>1</sup>, [daniswaranursyabani@gmail.com](mailto:daniswaranursyabani@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rismawirab@gmail.com](mailto:rismawirab@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The information in the Budget Realization Report (LRA) that has been published by a public institution can be used to improve the situation's financial performance. The Budget Realization Report is one of several work unit financial accountability reports that are still in use. Report readers will be able to conduct an analysis of the performance of financial reports, including an analysis of income, an analysis of expenditure, and an analysis of financing, according to Budget Realization Report. The purpose of this research is to find out and analyze the spending performance in Budget Realization Report of the Ministry of Health Republic Indonesia. the analysis method used in this study is the descriptive quantitative method. The following analysis was carried out: Analyzes of the Variants of Expenditure (Spending Difference), Expenditure Growth, Conformity of Expenditure, and Efficiency of Expenditure. Based on the analysis that was done, it can be seen that the Budget Realization Report of The Ministry of Health for the 2019, 2020, and 2021 will be as: Variances are higher in 2019 (5,40%) than 2020 (4,50%) and 2021 (2,85%), meanwhile spending growth ratio at the start of Coronavirus Pandemic, 2020, increased by 51,90%. At 2021 spending growth faster that is 103,81%. After the Pandemic Covid-19, the Ministry of Health reported an increases of 77,85% as a result of the overall expenditure growth.*

**ABSTRAK**

Informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diterbitkan oleh suatu lembaga publik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan lembaga tersebut. LRA merupakan salah satu dari beberapa laporan pertanggungjawaban keuangan unit kerja yang masih digunakan. Para pembaca laporan keuangan dapat melakukan analisis terhadap kinerja laporan keuangan yang meliputi analisis pendapatan, analisis pengeluaran, dan analisis pembiayaan di LRA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja belanja pada LRA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif. Berikut analisis yang digunakan, yaitu: Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja), Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Kecerahan Belanja, dan Analisis Efisiensi Belanja. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa LRA pada Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yaitu: pada tahun 2019 analisis varians belanja paling tinggi (5,40%) dibandingkan dengan tahun 2020 (4,50%) dan tahun 2021 (2,85%), sedangkan pada rasio pertumbuhan belanja awal Pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020 meningkat sebesar 51,90%. Pada tahun 2021 pertumbuhan meningkat tajam sebesar 103,81%. Pasca Pandemi Covid-19, Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan sebesar 77,85% akibat pertumbuhan belanja secara keseluruhan.

**Kata kunci: Kementerian Kesehatan, Kinerja Belanja, Laporan Realisasi Anggaran**

**1. PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan wajib membuat laporan kinerja setiap tahun. Pembuatan laporan kinerja sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tindakan yang dilakukan terhadap indikator dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan. Pelaporan kinerja sebagai alat pengukuran kinerja dan evaluasi internal agar kinerja lebih optimal dan sumber daya yang memadai mendukung penyampaian kinerja.

Pengelolaan pendapatan dan belanja diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, dan

meningkatkan profitabilitas untuk memenuhi tujuan ekonomi makro, APBN bertindak sebagai pemangku kepentingan dan sumber pendanaan. Keberhasilan pemerintah dalam mengelola APBN diukur dari efisiensi keuangannya. Keberhasilan hasil keuangan dapat dinilai dengan nilai atau angka yang membandingkan anggaran dan pelaksanaannya dalam laporan keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah berpedoman ini mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah. Penggunaan SAP diharapkan dapat meningkatkan kredibilitasnya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah untuk mencapai pengelolaan yang baik. Laporan keuangan negara meliputi laporan kinerja anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran memuat informasi besaran anggaran dan pelaksanaannya. Di Direksi, LRA memiliki informasi penting untuk menilai kinerja keuangan dibandingkan dengan neraca. Selain itu, LRA juga digunakan sebagai alat pemantauan, distribusi, alokasi dana masyarakat, perencanaan dan pengendalian organisasi.

Pengeluaran LRA Departemen Kesehatan merupakan bagian penting yang menggambarkan kegiatan ekonomi dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Sifat konsumsi relatif mudah diimplementasikan, yang sangat rentan terhadap inefisiensi dan kecurangan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan operasional, pengendalian pengeluaran dan pemantauan. Selain itu, analisis konsumsi juga sangat penting sebagai dasar evaluasi musim depan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Laporan Keuangan

Pengeluaran LRA Departemen Kesehatan merupakan bagian penting yang menggambarkan kegiatan ekonomi dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Sifat konsumsi relatif mudah diimplementasikan, yang sangat rentan terhadap inefisiensi dan kecurangan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan operasional, pengendalian pengeluaran dan pemantauan. Selain itu, analisis konsumsi juga sangat penting sebagai dasar evaluasi musim depan. Laporan keuangan menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) merupakan bagian dari proses pelaporan yang komprehensif. Contoh laporan tersebut adalah neraca, laporan laba

rugi dan neraca. Menurut Irham Fahm (2016:21) Laporan keuangan adalah informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan hasil dan posisi keuangan perusahaan.

Laporan keuangan umum dirancang untuk membantu pengguna membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya dengan memberikan informasi tentang kondisi keuangan, pelaksanaan anggaran, surplus anggaran, hasil operasi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Laporan keuangan umum, yang juga memainkan peran peramalan dan peramalan, memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan operasi bisnis dan risiko ketidakpastian yang terlibat.

### Akuntansi Pemerintahan

Hasanah, Fauri (2017:1) Mendefinisikan akuntan publik sebagai kegiatan yang memberikan jasa berdasarkan informasi keuangan publik sebagai bagian dari proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan interpretasi transaksi keuangan entitas publik. Tujuan umum akuntan publik adalah kebaikan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, i. H. menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar akuntansi negara adalah seperangkat prosedur, penyelenggara, perangkat, dan elemen untuk menjalankan fungsi akuntansi dari analisis hingga pelaporan keuangan.

Laporan keuangan negara terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Keuangan dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Bagian laporan realisasi anggaran terdiri dari perubahan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan SAL (Saldo Lebih Anggaran). Bagian laporan keuangan terdiri dari neraca, LO (laporan operasional), LPE (laporan perubahan ekuitas) dan LAK (aliran konsumsi).

### Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Indra Bastian (2007:308), laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan pada awal periode dengan jumlah realisasi pada akhir periode. Laporan Kinerja Anggaran (LRA) membandingkan anggaran dengan pelaksanaannya dalam suatu periode keuangan dan menjelaskan sumber, alokasi, dan penggunaan dana. Bagian-bagian yang membentuk LRA adalah pengeluaran, transfer, pendanaan, pendapatan LRA, dll.

Pendapatan LRA adalah pendapatan Bendahara yang menambah dana anggaran selama periode anggaran yang berlaku. Tanda terima ini ditanggguhkan dan tidak perlu dikembalikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan lain yang sah merupakan komponen pendapatan LRA.

Pengeluaran adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara yang mengakibatkan berkurangnya saldo pada periode anggaran yang bersangkutan. Pembelian diperlukan dan tidak dapat dikembalikan. Biaya operasional, biaya modal, dan kontinjensi adalah bagian dari biaya.

Transfer adalah pengeluaran atau pendapatan keuangan yang isinya dijelaskan lebih rinci. Ini termasuk reksa dana dan dana campuran. Transfer pada dasarnya merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pendanaan adalah pendapatan/pengeluaran yang nantinya harus dibayar kembali atau ditarik untuk menutupi kerugian atau penggunaan anggaran yang berlebihan.

## Belanja Negara

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan perekonomian negara. APBN merupakan alat untuk memantau jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan jumlah uang yang dihasilkan untuk proyek-proyek publik dan pembangunan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan nasional.

Penggunaan APBN harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Dengan PSAP no. 02, penetapan dan pengungkapan beban keuangan dapat dilaporkan dalam bentuk LRA yaitu beban usaha, beban modal dan kewajiban kontinjensi.

## 3. METODOLOGI

### Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kementerian Kesehatan. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA) Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2019-2021. Metode pemeriksaan ini adalah metode purposive sampling (reciprocal sampling). Menurut Sugiyono (2016:85), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan aspek-aspek yang berbeda. Metode purposive sampling digunakan dalam penelitian yang tidak digeneralisasikan dan cocok untuk penelitian kuantitatif.

### Alat Analisis Belanja

Alat analisis untuk mengukur kinerja belanja pada Kementerian Kesehatan yaitu:

1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Analisis pengeluaran sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengeluaran yang diberikan. Mulyadi (2014:395) menyatakan bahwa varian adalah penyimpangan biaya aktual dari biaya standar. Analisis persamaan varian adalah:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran}$$

### 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan belanja tiap tahunnya. Analisis ini dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Realisasi Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t-1)}$$

### 3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat proporsi belanja.

- 1) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja  
Analisis ini adalah perbandingan antara jumlah realisasi belanja modal dengan total belanja. Analisis ini dapat dihitung menggunakan.

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

- 2) Analisis Efisiensi Belanja  
Analisis ini adalah perimbangan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur besar pengirisan anggaran Kementerian Kesehatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Gambar 1. Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2020-2022**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih	%
2019	71.121.938.460.000	67.279.326.079.500	-3.842.612.380.500	-5,40
2020	107.033.608.465.000	102.207.399.746.493	-4.826.208.718.507	-4,50
2021	214.443.818.867.000	208.317.674.868.246	-6.126.144.058.754	-2,85

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa selisih anggaran dan realisasi terbesar pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 3.842.612.380.500 atau sebesar 5,40%. Sedangkan selisih terkecil yaitu pada Tahun 2021 sebesar 2,85%. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui terdapat penurunan selisih anggaran dan realisasinya setiap tahunnya.

**Gambar 2. Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2019-2020**

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan	
	2019	2020	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Operasional				
Belanja Pegawai	5.320.523.710.930	5.010.578.630.437	(319.945.080.493)	-6,01%
Belanja Barang	22.390.617.563.645	43.720.797.191.892	21.330.179.628.247	95,26%
Belanja Modal	3.791.042.130.925	4.851.079.038.164	1.060.036.907.239	27,96%
Belanja Bantuan Sosial	35.777.142.674.000	48.624.944.886.000	12.847.802.212.000	35,91%
<b>BELANJA</b>	<b>67.279.326.079.500</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>34.918.073.666.993</b>	<b>51,90%</b>

Sumber : Data diolah 2023

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja pada Tahun 2020 mengalami kenaikan kecuali pada Belanja Pegawai yang mengalami penurunan sebesar Rp 319.945.080.493 atau sebesar -6,01%. Sedangkan untuk keseluruhan belanja pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 51,90%.

**Gambar 3. Rasio Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2020-2021**

Uraian	Realisasi		Pertumbuhan	
	2020	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Operasional				
Belanja Pegawai	5.010.578.630.437	5.004.108.008.609	(6.470.621.828)	-0,12
Belanja Barang	43.720.797.191.892	155.217.721.223.151	111.496.924.031.259	255,02
Belanja Modal	4.851.079.038.164	3.342.857.191.286	(1.508.221.846.878)	31,09
Belanja Bantuan Sosial	48.624.944.886.000	44.752.988.445.200	(3.871.956.440.800)	-7,96
<b>BELANJA</b>	<b>102.207.399.746.493</b>	<b>208.317.674.868.246</b>	<b>106.110.275.121.753</b>	<b>103,81</b>

Sumber : Data diolah 2023

Pada Tabel 3 terlihat rasio pertumbuhan belanja untuk Tahun 2021 untuk Belanja Pegawai menurun sebesar -0,12%, untuk Belanja Barang meningkat sebesar 255,02%, untuk Belanja Modal juga mengalami kenaikan sebesar 31,09%, dan untuk Belanja Bantuan Sosial menurun sebesar -7,96%. Secara keseluruhan rasio belanja pada Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 103,81%.

**Gambar 4. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja**

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	%
2019	3.791.042.130.925	67.279.326.079.500	5,63
2020	4.851.079.038.164	102.207.399.746.493	4,74
2021	3.342.857.191.286	208.317.674.868.246	1,60

Sumber : Data diolah 2023

Tabel 4 menunjukkan rasio pada Tahun 2019-2021. Rasio tertinggi ada di tahun 2019 yaitu sebesar 5,63% dan rasio terendah ada di tahun 2021 yaitu 1,60%.

**Gambar 5. Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019-2021**

Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	%
2019	67.279.326.079.500	71.121.938.460.000	94,60
2020	102.207.399.746.493	107.033.608.465.000	95,49
2021	208.317.674.868.246	214.443.818.867.000	97,14

Sumber : Data diolah 2023

Pada Tabel 5 menunjukkan rasio efisiensi belanja yang meningkat tiap tahunnya. Rasio efisiensi belanja tertinggi pada tahun 2021 sebesar 97,14%. Sedangkan untuk rasio terkecil pada Tahun 2019 yaitu sebesar 94,60%. Rata-rata dari rasio ini yaitu 95,74%.

## 1. Analisis Varians Belanja (Selisih Belanja)

Tahun Anggaran 2019 selisih anggaran belanja dan realisasinya bernilai negatif, ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran belanja sebesar Rp 3.842.612.380.500 atau 5,40%. Tahun Anggaran 2020 selisih anggaran belanja sebesar Rp 4.826.208.718.507 atau 4,50%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 selisih anggaran belanja sebesar Rp 6.126.144.058.754 atau 2,85%.

Hal ini berarti Kementerian Kesehatan menggunakan anggaran belanja dengan bijak, dimana realisasi belanja Kementerian Kesehatan lebih rendah dari anggaran yang telah direncanakan. Jika dilihat dari analisis varians belanja, Kementerian Kesehatan dapat dikatakan sudah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan bijak.

## 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pada Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 34.918.073.666.993 atau 51,90% dari total realisasi belanja Tahun 2019. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 106.110.275.121.753 atau 103,81% dari total realisasi belanja Tahun Anggaran 2020. Kenaikan yang signifikan pada pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2020-2021 ini disebabkan oleh banyaknya belanja yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan karena Pandemi Covid-19. Dikarenakan banyaknya fasilitas yang harus disediakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pada saat Pandemi Covid-19, mengakibatkan pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2020-2021 mengalami kenaikan.

## 3. Analisis Efisiensi Belanja

Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Kesehatan dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja. Tahun 2019, total realisasi belanja sebesar 94,60% dari total anggaran belanja yang dianggarkan Kementerian Kesehatan. Tahun 2020, total realisasi belanja sebesar 95,49% dari total anggaran belanja yang dianggarkan Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk Tahun 2021 total realisasi anggaran belanja sebesar 97,14% dari total anggaran belanja yang dianggarkan Kementerian Kesehatan.

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 Kementerian Kesehatan bisa dikatakan belanja anggaran yang dikeluarkan sudah efektif. Dapat dilihat dari rasio efektifitas belanja Tahun Anggaran 2019-2021 kurang dari 100%, dengan rata-rata efisiensi belanja sebesar 95,74%.

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Kesehatan meningkat pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021, dibuktikan dari:

1. Tahun 2019 jumlah anggaran belanja Rp 71.121.938.460.000 dengan realisasi belanja Rp 67.279.326.079.500 meningkat pada Tahun 2020, anggaran belanja Rp 107.033.608.645.000 dengan realisasi belanja Rp 102.207.399.746.493 meningkat lagi pada Tahun 2021 yaitu anggaran belanja sebesar Rp 214.443.818.867.000 dengan realisasi belanja Rp 208.317.674.868.246.

2. Varians belanja pada Tahun 2019 (5,40%) lebih tinggi dari Tahun 2020 (4,50%) dan Tahun 2021 (2,85%). Analisis varians belanja semakin turun setelah adanya Pandemi Covid-19.

3. Rasio pertumbuhan belanja pada saat awal terjadi Pandemi Covid-19 yaitu Tahun 2020 meningkat sebesar 51,90%. Sedangkan pertumbuhan belanja pada Tahun 2021 dan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 meningkat sebesar 103,81%. Secara keseluruhan pertumbuhan belanja Kementerian Kesehatan mengalami kenaikan setelah terjadi Pandemi Covid-19 yaitu sebesar 77,85%.

## 5.2 Saran

1. Penyerapan anggaran belanja pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2019-2021 belum begitu baik, karena pada realisasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum memaksimalkan anggaran yang diberikan. Maka penulis menyarankan supaya pengoptimalan dalam penyerapan anggaran belanja lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

2. Pada Analisis Pertumbuhan Belanja pada Tahun Anggaran 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 34.918.073.666.993 dari total realisasi belanja tahun 2019. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 106.110.275.121.753 dari total realisasi belanja Tahun Anggaran 2020. Maka disarankan untuk tahun selanjutnya, sudah tidak adanya pandemi Covid-19 bisa diminimalisir pada banyaknya belanja agar tidak ada lagi peningkatannya yang signifikan.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gusti Ayu Givsa Inge Anersa Putri, O. L. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. *Economi & Education Journal*, Vol. 4, No. 1.
- Indonesia, R. (n.d.). *Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2014*. Tangerang Selatan: Legalitas.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021, Mei). *PPID Kemenkes*. Retrieved Februari 28, 2023, from [https://ppid.kemendes.go.id/uploads/img\\_60e522078c711.pdf](https://ppid.kemendes.go.id/uploads/img_60e522078c711.pdf)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022, Mei). *PPID Kemenkes*. Retrieved Februari 28, 2023, from [https://ppid.kemendes.go.id/uploads/img\\_62e0a3a899ae6.pdf](https://ppid.kemendes.go.id/uploads/img_62e0a3a899ae6.pdf)
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Legalitas.
- Ni Nyoman Sri Ayu Lestari, I. W. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 1.
- Rachmad Chartady, V. M. (2022). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). *Open Journal Systems*, Vol.17 No.1.
- Santoso, M. S. (2021). Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Volume 2, No.2.
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol.18, No.2.